

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing di Indonesia

ABSTRAK

Program PMT (Pembinaan Masyarakat Terasing) di Indonesia menggunakan pola permukiman kembali, yakni memindahkan penduduk asli atau suku terasing ke pemukiman baru. Dengan pemukiman baru diharapkan suku terasing, seperti Suku Kubu, dapat dimasyarakatkan seperti layaknya masyarakat yang sudah maju. Maka disusunlah perencanaan berdasarkan konsep ideal yang rapi, dengan penanggung jawab teknis adalah Departemen Sosial. Namun program "pembinaan" ini ternyata mengalami kegagalan. Tidak cukup bertahan dalam setengah tahun, atas kesadaran mereka dan pertimbangan rasional mereka, maka orang-orang Suku Kubu ini kembali ke pondok-pondok asal mereka di Bukit Duabelas. Program "pembinaan" yang mereka harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Program "pembinaan" dengan pola permukiman kembali suku terasing, termasuk Suku Kubu, justru merupakan proses pengasingan bagi masyarakat terasing yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional yang justru mungkin dapat membangun kembali tatanan masyarakat modern yang lebih menjamin penghargaan atas kemanusiaan. Hasil analisis dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa untuk mensukseskan program memasyarakatkan suku terasing harus diubah dari pola "pembinaan" menjadi pola "pemberdayaan" dengan berbagai kebijakan yang lebih memperhatikan aspirasi dan nilai-nilai budaya lokal yang mereka miliki.

Kata-kata kunci: *Evaluasi program, suku terasing di Indonesia, pembinaan dan pemberdayaan, serta kearifan lokal dan tradisional.*

PENGANTAR

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi maka telah mempersempit ruang dan waktu. Menurut Herakleitos, seorang filsuf yang berasal dari Yunani, ruang dan waktu adalah bingkai yang di dalamnya seluruh realitas kehidupan kita hadapi. Kita tidak bisa mengerti benda-benda nyata apapun tanpa meletakkannya pada bingkai ruang dan waktu (dalam Cassirer, 1987:63).

Lingkungan kita memang terbatas dan ruang itu ternyata pula penuh dengan hal-hal abstrak dan konkret yang ditemui dan dialami oleh manusia. Disamping hal tersebut, ada juga unsur dan wujud yang diwarisi serta dipelajari dari nenek-moyang. Peradaban selalu dinamis dan mudah bereaksi terhadap

Dr. Mat Syuroh adalah Dosen pada Program Pascasarjana STISIPOL (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), Jalan Swadaya/Basuki Rahmat, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Alamat surel (surat elektronik) beliau adalah: aspensi@yahoo.com

kegiatan yang ada di lingkungan pada waktu tertentu. Kelompok manusia atau masyarakat dan individu atau pribadi selalu menginterpretasikan suatu peristiwa yang berbeda dengan kelompok atau individu dengan latar belakang lain atau yang berpola pikir berbeda. Maksudnya, kita hidup dalam suatu lingkungan yang membentuk sikap individu, kebudayaan masyarakat, dan lingkungan alam.

Dalam pandangan para ilmuwan sosial dan humaniora, maraknya masalah kemanusiaan dan keagamaan membuat dunia semakin lebar dan mengglobal. Persoalan global ini muncul ketika titik kerumitan semakin memuncak. Para ahli mulai mencari akar masalah yang mengglobal itu di dalam wilayah-wilayah kehidupan yang mulanya hampir tidak pernah mendapat prioritas. Dibayangi masalah global tersebut, maka studi terhadap kehidupan masyarakat terasing ini merupakan bagian terkecil dari upaya mencari sendi-sendi dari bagian bangsa yang terpendam dan hampir dilupakan.

SUKU TERASING DI INDONESIA DAN TANTANGAN ZAMAN

Sampai sekarang, peradaban suku pedalaman tetap mempertahankan gaya hidupnya secara tradisional dan turun-temurun sejak dari nenek-moyang mereka. Walaupun tekanan dari luar sangat kuat untuk merubah pola kehidupan tradisional ke pola hidup modern, namun kelompok minoritas suku terasing tetap berpola hidup tradisional. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, suku pedalaman harus mencari dari hasil bumi yang ditemukan di tanah suku tradisional. Ladang minyak, kayu, batu-bara, emas, perunggu dan bahan mineral lain, dan tanah untuk mengembangkan perkebunan sawit, karet, kopi, dan lainnya harus dibuka.

Pada hakekatnya, Taman Nasional, atau daerah lain, dilihat dari sudut pandang kelompok utama saja dan semua pandangan diorientasikan penilaiannya pada kebudayaan mereka. Atau menurut pandangan penulis bahwa sudut pandang kelompok sendiri menjadi pusat dalam melihat segala sesuatu, dan segala hal diukur dan dinilai dengan sudut pandang itu. Maknanya, kebutuhan suku pedalaman mungkin menjadi sekunder. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah “etnosentrik” yang digunakan oleh Sumner sejak awal abad ke-20 Masehi (dalam Soelaiman, 1998).

Pada umumnya, saat seorang suku minoritas memasuki masyarakat pasca tradisional, mereka menjadi bagian lapisan terbawah di masyarakat. Dalam hal ini Margaret Mead mengamati bahwa manusia terus-menerus dibentuk, termasuk oleh masyarakat sekitarnya (dalam Djoewisno, 1988). Banyak keahlian dan ketrampilan yang diwariskan oleh nenek-moyang manusia tradisional akan hilang pada saat mereka memasuki kebudayaan pasca tradisional. Sama dengan kehilangan spesies flora dan fauna, keanekaragaman budaya juga terancam oleh kegiatan dan norma masyarakat pasca tradisional, yang sebetulnya gaya hidupnya jauh lebih sempurna.

Menurut Malinowski, proses observasi masyarakat sangat penting untuk memahami bagaimana kebudayaan masyarakat tradisional bisa memenuhi kebutuhan mereka (dalam Dove, 1997). Sementara itu, Jean La Fontaine mengatakan bahwa Antropologi Sosial dikenal sebagai observasi partisipan, yang pada intinya adalah pengamatan langsung serta hidup dengan kelompok yang diobservasi dan belajar bahasanya (dalam Soelaiman, 1998).

Di Indonesia terdapat 300 lebih kelompok suku bangsa yang sifat hidupnya berbeda cukup signifikan dari kelompok lain. Disamping itu, mereka mempunyai identitas yang berbeda dan menggunakan lebih dari 200 bahasa khas. Namun demikian, menurut postulasi ahli bahasa Robert Blust, sebagian besar bahasa di Indonesia termasuk rumpun bahasa Melayu Polinesia (dalam Andaya, 1993).

Kira-kira 240 juta penduduk Indonesia tersebar di lebih dari 14,000 pulau dan sekitar 1.5 persen jumlah penduduk Indonesia hidup dengan cara tradisional. Aktivitas kehidupan mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat subsisten, dan / atau aktivitas hiburan yang mereka lakukan jauh berbeda dengan kelompok manusia lain (Dove, 1997).

Masyarakat Indonesia menganut bermacam-macam agama dan sejumlah besar kepercayaan tradisional yang dapat ditemui di daerah yang terpencil. Kepercayaan-kepercayaan tradisional sering diakulturasikan dengan ajaran agama Islam, Hindu, atau Kristen. Juga ada jumlah penganut agama yang memasukkan unsur-unsur kepercayaan nenek-moyang. Misalnya di Jawa, unsur-unsur Hindu dan animisme masuk dalam agama Kristen dan Islam. Kelihatannya dengan akulturasi tersebut, agama dengan unsur-unsur kepercayaan tradisional menyebabkan kemunculan kosmos baru (Soelaiman, 1998).

Sementara itu, Sumatera merupakan pulau yang memiliki sejumlah suku-suku besar yang mempunyai ciri khas tradisional. Suku yang terkenal adalah Aceh, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Selain itu ada pula sejumlah suku-suku minoritas di Sumatera sebelah timur di kawasan hutan luas diantara sungai-sungai besar, rawa-rawa pantai, dan pulau-pulau lepas pantai. Kebanyakan suku minoritas di Kabupaten Musi Banyuasin dan sekitarnya dikenal dengan nama umum *Orang Kubu*, yang benar-benar memiliki tradisi sendiri. Di kawasan pantai tersebut terdapat *Orang Akit*, *Orang Utan*, dan *Orang Kuala* atau *Duano*. Di pulau-pulau lepas pantai terdapat pula *Orang Laut* dan *Orang Darat* dari kepulauan Riau dan Lingga. Adapula *Orang Sekak* di pesisir kepulauan Belitung, dan *Orang Lom* di sebelah utara pulau Bangka.

Di pedalaman terdapat *Orang Sakai*, yang berlokasi diantara sungai Rokan dan Siak. *Orang Petalangan* ada diantara sungai Siak dan Kampar, dan diantara sungai Kampar dan Indragiri. Ada *Orang Talang Mamak* diantara sungai Indragiri dan Batang Hari. *Orang Batin Sembilan* di daerah antara sungai Batang Hari dan sungai Musi.

SUKU KUBU, KONSEP PEMBINAAN, DAN PROSES PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Dalam tulisan ini penulis memfokuskan diri pada *Orang Kubu* dan salah satu suku lainnya yang dikenal dengan nama *Orang Batin Sembilan*. Menurut salah satu anggota suku *Orang Kubu*, kelompok *Orang Batin Sembilan* masih tinggal di lingkungan tradisional mereka. Walaupun nama suku “Kubu” sudah digunakan sejak beberapa abad, arti nama berubah dan konotasi nama itu tidak selalu sesuai dengan keinginan mereka lagi. Supaya lebih cocok dengan keinginan mereka, maka dikenal dengan nama yang disebut *Orang Batin Sembilan*, *Suku Kubu*, dan kadang-kadang berkonotasi sebagai *Orang Kubu* atau istilah yang digunakan oleh pemerintah, yaitu *Suku Anak Dalam* (SAD). Dalam tulisan ini beberapa data dari suku tetangga *Suku Kubu*, yakni suku *Orang Batin Sembilan*, dijadikan sebagai studi perbandingan. Alasannya karena ada beberapa perbedaan sifat terkait dengan sosial-budaya *Suku Kubu* dengan *Orang Batin Sembilan*.

Sampai sekarang, kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat tradisional *Suku Kubu* masih bertahan dari pengaruh pola kehidupan sosial dan kebudayaan yang muncul dari pinggiran daerah tradisional mereka. Kelihatannya, masyarakat perantau yang membuka hutan pinggiran lokasi mereka dalam waktu 10 tahun terakhir telah berpengaruh terhadap pola hidup *Suku Kubu*. Hal ini berdampak pula pada pola pencarian nafkah, kehidupan sosial, dan aspek kehidupan lain *Suku Kubu*. Misalnya, penebangan kayu liar dan pembukaan lahan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit adalah aktivitas yang tidak umum bagi kehidupan *Suku Kubu* yang pola kehidupannya masih primitif. Mereka merupakan suku yang tergolong defensif dan bertahan atau berjuang untuk mempertahankan hak adatnya yang tidak selalu diterima oleh institusi resmi pemerintah yang mengatur hukum formal. Salah satu sudut pandang menganggap ciri kehidupan mereka sebagai bertentangan dengan kehidupan modern, karena itu perlu diberi sentuhan modernitas melalui program yang terorganisasi dengan mempunyai target tertentu (Dongen, 1910).

Sejak zaman Orde Baru (1965-1998), pembangunan di Indonesia kemudian menjadi populer sebagai suatu konsep legendaris sehingga hampir semua aktivitas di dalam ruang negara bernuansa “pembangunan”. Jika pelaksanaannya di Desa, maka yang berlaku adalah konsep “Pembangunan Desa”. Namun pada hakikatnya, menurut pemerintah Orde Baru, pembangunan desa adalah juga pembangunan nasional, karena negara adalah perwujudan besar daripada desa, dan desa adalah perwujudan kecil daripada negara (Dove, 1997).

Konvergensi ini, menyangkut proses pembangunan desa, justru bertolak belakang dengan pendapat Parsudi Suparlan, yang menyatakan bahwa pembangunan itu merupakan proses “memasukkan desa ke dalam negara”, yaitu melibatkan masyarakat desa agar ikut-serta dalam kegiatan masyarakat yang lebih luas. Ini dilakukan melalui pengenalan kelembagaan baru dan penyebaran gagasan modernitas ke dalam kehidupan desa. Selanjutnya,

program pembangunan desa itu juga terwujud melalui proses “memasukkan negara ke dalam desa”. Ini adalah proses memperluas kekuasaan dan hegemoni negara sehingga merasuk ke dalam kehidupan masyarakat desa dan sering mengakibatkan peningkatan ketergantungan desa terhadap negara (Suparlan, 1988).

Dalam rangka pembangunan desa di pulau Sumatera telah dilakukan sebuah program oleh Departemen Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yaitu “pembinaan masyarakat terasing”, terutama terhadap *Suku Kubu* di kawasan Bukit Duabelas, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sasaran program ini adalah 80 (delapan puluh) kepala keluarga masyarakat *Suku Kubu* yang bermukim di hutan Batang Hari Leko sebelah Barat kawasan Bukit Duabelas, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan cara memindahkannya ke pemukiman baru (Depsos RI, 2000).

Pemindahan tahap pertama dimulai tahun 1998. Namun belum mencapai satu tahun kemudian, hampir semua kepala keluarga telah kembali ke pondok-pondok mereka di hutan. Kepala Desa selaku motivator tunggal dan beberapa aparat dari Departemen Sosial yang bertanggung jawab di lapangan hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya sebagian kecil, yaitu *Suku Kubu* yang sudah terlanjur menjadi pekerja di beberapa keluarga dan mendapat tanggung jawab menjadi penjaga kebun penduduk kawasan Bukit Duabelas, Kabupaten Musi Banyuasin yang masih bertahan untuk tetap tinggal.

Untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan program, proyek diusahakan agar tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Berbagai bantuan yang diberikan oleh pihak Departemen Sosial, baik dalam bentuk dana maupun bahan kebutuhan rumah tangga, tetap mengalir sesuai jadwal. Pemerintah, melalui Departemen Sosial, telah melaksanakan program pembinaan terhadap masyarakat *Suku Kubu* dengan tujuan idealnya adalah membentuk masyarakat *Suku Kubu* menjadi manusia-manusia pembangunan. Diharapkan juga agar masyarakat *Suku Kubu* dapat beradaptasi dengan masyarakat pada umumnya dan pada khususnya diharapkan dapat lahir kesadaran baru di dalam masyarakat *Suku Kubu*, bahwa sesungguhnya mereka justru terasing dari realitasnya sendiri. Memang, eksistensi mereka di lokasi pembinaan telah melahirkan anggapan dari masyarakat setempat bahwa mereka sebagai orang asing yang bodoh dan sangat tradisional sehingga belum atau tidak perlu digauli.

Suku Kubu, yang terbangun atas genius lokalnya sendiri (Andree, 1874), sesungguhnya bersikap rasional dengan secara massal kembali ke pemukiman awal di hutan Bukit Duabelas Batang Hari Leko. Dengan segala kesederhanaan, mereka membangun kembali kehidupan dengan mengandalkan amanat leluhur yang telah mengendap sebagai barang sesuatu yang mengejutkan di dalam perilaku keseharian mereka. Bentangan waktu telah dilalui, akhirnya mereka menerima sebagai masyarakat binaan. Hal ini merupakan fakta yang cukup kuat untuk dijadikan bukti bahwa mereka mampu hidup sebagai bagian kecil dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia.

Pembinaan dengan pola permukiman kembali yang diberlakukan bagi mereka layakny mendapat peninjauan ulang. Apa yang harus dibina dari masyarakat yang memiliki kearifan terhadap sesamanya? Apa yang harus dibina dari masyarakat yang telah membuktikan hidup selama ratusan tahun dengan pola hidup yang sama? Barangkali pertanyaan–pertanyaan tersebut perlu dijadikan alasan untuk melahirkan konsep–konsep baru menyangkut istilah ”pembinaan” yang lebih berorientasi pada pemberdayaan rakyat asli (*empowering of indigenous people*).

Istilah ”pembinaan” adalah sebuah konsep populer dalam sistem organisasi birokrasi di Indonesia. Sering didengar istilah-istilah dari konsep aparatur negara seperti: *pembinaan* pegawai negeri sipil, *pembinaan* karier, *pembinaan* masyarakat terasing, *pembinaan* remaja, *pembinaan* masyarakat desa, dan sebagainya. Konsep ini dianggap penting sebab sangat menentukan kesinambungan tujuan pembangunan nasional dan stabilitas nasional.

Salah satu definisi tentang *pembinaan* adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan–urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, dan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha–usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya (Djoewisno, 1988). Dalam definisi tersebut secara implisit mengandung suatu interpretasi bahwa *pembinaan* adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Untuk menghindari bias kepentingan individu dengan kepentingan organisasi, maka diperlukan pembinaan yang bermuatan suatu tugas, yakni meningkatkan disiplin dan motivasi. Masyarakat mengartikan peningkatan kepedulian untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan sehingga pembinaan berfungsi untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan disiplin kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Merujuk pada pendefinisian di atas, jika diinterpretasikan lebih jauh, maka pembinaan didasarkan atas suatu konsensus yang baku dan memiliki sifat berlaku untuk semua. Pembinaan merupakan suatu perangkat sistem yang harus dijalankan secara fungsional untuk menjamin bertahannya sistem tersebut hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Definisi ini berlaku untuk semua konsep pembinaan. Jika dipertemukan dengan ciri masyarakat Indonesia yang pluralistik, maka konsep pembinaan ini akan melahirkan persatuan dan kesatuan.

Konsekuensinya, semua perbedaan hanya sekadar simbol dan tidak diindahkan, yang riil dan menjadi alasan bagi kesadaran bangsa adalah kesetupaduan. Pertanyaan yang harus dijawab di sini adalah apakah pembinaan dengan cara dan pola yang sama harus dipaksakan kepada semua unsur masyarakat, baik tradisional maupun modern dan organisasi non-formal maupun informal, yang secara geografis, kebudayaan, dan orientasi nilainya berbeda?

Dalam konteks yang lebih sempit, menyangkut pembinaan masyarakat terasing *Suku Kubu* yang menjadi sasaran studi ini, jawaban atas pertanyaan tersebut akan lebih menyentuh aspek riil. Hal ini mulai ditelusuri melalui konsep masyarakat terasing yang bersumber dari prinsip berlaku untuk semua, yakni definisi menurut SK (Surat Keputusan) Menteri Sosial No.5 Tahun 1994, yang menyatakan bahwa:

Masyarakat terasing adalah kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau berkelana di tempat-tempat yang secara geografik terpencil, terisolir, dan secara sosial-budaya terasing dan atau masih terbelakang dibandingkan dengan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya (Depsos RI, 1994).

Definisi tersebut intinya menjelaskan tentang kondisi masyarakat yang terisolasi, baik secara teritorial maupun secara sosial-budaya dari realitas kehidupan bangsa Indonesia secara umum. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri tersebut dinyatakan "terasing" secara struktural. Oleh sebab itu, mereka harus dikeluarkan dari posisi keterasingan itu melalui pembinaan, yakni pembinaan yang seluruh proses, baik teknis maupun non-teknisnya, telah baku dan berlaku kepada semua jenis masyarakat terasing. Fakta di lokasi studi ternyata mengandung berbagai masalah.

MASALAH DAN METODE PENELITIAN

Berdasarkan paparan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana profil kehidupan *Suku Kubu*?; (2) Bagaimana implikasi sosiologis dan psikologis tentang realisasi program permukiman sosial bagi *Suku Kubu*?; (3) Bagaimana proses adaptasi *Suku Kubu* di permukiman sosial?; dan (4) Bagaimana implementasi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pada program pembinaan masyarakat terasing, khususnya *Suku Kubu*?

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Bukit Duabelas, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, di wilayah kecamatan Batang Hari Leko. Cara dan alat yang dipakai berdasarkan prosedur penelitian kualitatif (Azwar, 1998). Penulis menggunakan hipotesis dari para antropolog sosial (Damsté, 1901). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi, riwayat hidup (*life-story*), wawancara, dokumentasi, penelitian arsip, serta studi pustaka. Studi lapangan yang dilakukan menggunakan metode diskriptif-kualitatif (Alasutari, 1996).

Data primer diperoleh dari jumlah populasi yang berjumlah 80 KK (Kepala Keluarga), terdiri atas masyarakat terasing yang telah atau pernah dibina. Dari jumlah tersebut ditentukan secara *purposive sampling* sebanyak 15 KK sebagai sumber utama dan 5 orang anggota masyarakat *Suku Kubu* sebagai sumber data komparatif. Selanjutnya ditentukan pula 5 orang informan, yakni dua tokoh masyarakat Suku Kubu, seorang Kepala Desa, dan dua orang dari Departemen Sosial. Data sekunder diperoleh dari semua literatur serta dokumen-dokumen yang mempunyai relevansi dengan tujuan studi ini.

Seluruh data diperoleh melalui cara: (1) Observasi partisipan yang bertujuan untuk mendapat data yang alamiah agar segala gerak-gerik subjek dalam penelitian ini dapat digambarkan berdasarkan perilaku-perilaku yang dicermati di lapangan. Tingkat akurasi sangat ditentukan oleh jalinan hubungan yang terbina melalui respon timbal-balik antara penulis dengan subjek penelitian; dan (2) Interview dimana teknik ini dilaksanakan dengan memberikan keleluasaan kepada responden untuk memberikan jawaban atau *free response interview* (Alasutari, 1996).

Untuk memperoleh kedalaman makna dalam suatu wawancara (*indept interview*), penulis memanfaatkan situasi-situasi khusus yang memungkinkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan hasil pemokusian dari wawancara sebelumnya. Data yang terakumulasi kemudian dianalisis secara kualitatif–interpretatif dengan langkah operasional, reduksi data, *display* data, pengujian kembali atau verifikasi, dan konklusi. Dalam menganalisis data, hingga tahap menyimpulkan, digunakan prinsip-prinsip berpikir induktif. Dengan kata lain, induksi merupakan proses pengorganisasian fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan (Azwar, 1998).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tentang Profil Kehidupan Suku Terasing. Masyarakat terasing atau suku terasing terbangun sebagai suatu struktur dalam sistem sosial. Rentang sejarah dari generasi ke generasi telah membawa masyarakat terasing kepada kenyataan sosial yang, diantaranya, diendapkan sebagai aturan-aturan penuh nilai dan norma-norma penyeimbang. Akar bangunan struktur itu menjadi pedoman hidup, sekaligus ciri ideal bagi perilaku seorang individu terhadap masyarakatnya (Ahimsa-Putra, 2001).

Dalam bangunan struktur masyarakat terasing, seperti *Suku Kubu*, tidak dikenal pola kekerabatan besar yang terdiri dari rumpun-rumpun kekerabatan kecil berdasarkan pertalian darah. Pola kekerabatan yang ada lebih dikenal dengan istilah "golongan", yang menunjukkan sekelompok orang yang masih mempunyai pertalian darah antara satu keluarga dengan keluarga lain sehingga secara keseluruhan mereka merupakan satu rumpun kekerabatan (Andaya, 2001).

Terbentuknya sistem kekerabatan (penggolongan keluarga-keluarga serumpun ini), sebagaimana nampak dalam masyarakat *Suku Kubu*, merupakan akibat dari pola kehidupan bersama yang dibangun secara terpisah dari golongan-golongan yang lebih besar. Permukiman masyarakat *Suku Kubu* di daerah perhutanan merupakan faktor utama adanya penggolongan rumpun suku ini sebagai masyarakat terasing. Dalam perspektif masyarakat terasing *Suku Kubu*, pola kekerabatan ini disebut dengan *Ngata Sintuvu* atau kehidupan bersama dalam satu kampung (wawancara dengan anggota *Suku Kubu*, 20/10/2009).

Ngata Sintuvu adalah istilah yang dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat *Suku Kubu* untuk menjelaskan tentang hubungan kekerabatan mereka. Menurut kepercayaan masyarakat *Suku Kubu*, eksistensi mereka dalam satu permukiman merupakan amanat leluhur yang harus dipertahankan. Meskipun salah satu atau beberapa keluarga memutuskan pindah ke lokasi baru, namun tempat tinggal semula tetap dianggap sebagai tempat asal atau rumah mereka yang sesungguhnya. Keterikatan masyarakat *Suku Kubu* dalam *Ngata Sintuvu* membawa masyarakat ini pada suatu kesadaran bersama yang tinggi sehingga memungkinkan lahirnya etnosentrisme. Kelompok masyarakat ini, dengan demikian, sangat membanggakan nilai tradisi yang telah mengendap sebagai kebudayaan immaterial. Hal ini mempengaruhi pola hubungan sosial dan pola produksi. Sangat jarang ditemukan proses jual-beli dengan menggunakan uang sebagai alat tukar, melainkan sistem pertukaran yang bersifat *barter* atau barang dengan barang (Andree, 1874; dan wawancara dengan anggota *Suku Kubu*, 20/10/2009).

Kebanggaan atas kebudayaan lokal tersebut menyebabkan lahir kesadaran bersama yang cukup dominan untuk tidak begitu saja menerima kebudayaan dari luar. Hubungan kekuasaan, seperti adanya Kepala Desa, Kepala Suku, atau istilah kepemimpinan lainnya, untuk masyarakat tradisional tidak dikenal oleh masyarakat *Suku Kubu*. Demikian halnya juga dengan lembaga-lembaga kekuasaan formal seperti LMD (Lembaga Musyawarah Desa), LKMD (Lembaga Kepemimpinan Masyarakat Desa), dan sebagainya jelas asing bagi masyarakat *Suku Kubu*. Bagi masyarakat *Suku Kubu*, kekuasaan secara mekanis dipegang oleh kepala-kepala keluarga dan *Sesepuh* dari Kepala Suku (*Temenggung*). Orang yang paling tua dianggap sebagai yang patut dihormati dan dipatuhi, serta dilaksanakan petuah atau nasihatnya. Mereka adalah orang-orang tua di kampung yang dianggap sebagai wakil leluhur dan memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar aturan, norma, dan nilai-nilai (adat) yang dipercaya dan dijunjung tinggi oleh masyarakat *Suku Kubu* (Damsté, 1901).

Sementara itu, penyebab adanya perpindahan rumpun kekerabatan masyarakat *Suku Kubu* ini pada umumnya adalah: (1) Perpindahan akibat lokasi pemukiman yang semakin sempit; (2) Pembagian lahan kebun yang semakin lama semakin besar akibat bertambahnya jumlah keluarga, selain itu lahan komunitas semakin sempit akibat dari pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat umum dan perusahaan perkebunan; (3) Menyangkut kepercayaan tradisional bahwa apabila di antara anggota keluarga atau kerabat ada yang meninggal dunia, maka keluarga paling dekat harus meninggalkan tempat tinggal tersebut untuk mencari tempat baru, dan hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa tempat tersebut tidak akan memberi berkah lagi kepada keluarga yang bersangkutan. Jadi, meskipun alasan pertama dan kedua di atas belum tampak, namun karena telah terjadi musibah berupa kematian, maka keluarga yang bersangkutan wajib meninggalkan tempat tersebut.

Dengan demikian, seluruh masyarakat akan terhindar dari kekurangan lahan kehidupan; (4) Alasan perpindahan karena perkawinan. Apabila salah satu anggota keluarga laki-laki menikah dengan rumpun keluarga lain tetapi di lokasi yang berbeda, maka keluarga laki-laki tersebut memilih pindah ke tempat calon istri. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang akan memberikan kemudahan rezeki bagi calon keluarga baru (wawancara dengan anggota *Suku Kubu*, 20/10/2009).

Tentang Implikasi Sosiologis dan Psikologis di Tempat Permukiman Baru. Pembinaan masyarakat terasing merupakan salah satu program unggulan Departemen Sosial. Pembinaan yang dilakukan pada suku terasing di pedalaman, atau dalam hal ini *Suku Kubu* di Bukit Duabelas, dengan cara membuatkan mereka tempat pemukiman baru, yaitu rumah-rumah perkampungan yang layak bagi masyarakat terasing *Suku Kubu* (Depsos RI, 2000).

Kelompok masyarakat *Suku Kubu* kemudian dipindahkan ke pemukiman baru tersebut dengan harapan agar *Suku Kubu* dapat bermasyarakat seperti layaknya masyarakat biasa pada umumnya. Setelah proses pemindahan tersebut memang nampaknya baik-baik saja dan berjalan lancar, lebih-lebih karena didukung secara material dan moral. Namun, kenyataan yang diperoleh setelah penelitian ini dilaksanakan, nampaknya ada beberapa masalah krusial yang jauh dari kondisi ideal seperti yang terungkap di atas. Ternyata, pihak Departemen Sosial yang bertanggung jawab sebagai pelaksana proyek di lapangan tidak mempertimbangkan implikasi sosiologis dan psikologis dari tempat permukiman yang baru tersebut. Departemen Sosial ternyata hanya menyediakan lahan seadanya yang berlokasi dekat perkebunan kelapa sawit, padahal *Orang Kubu* ini terasa risi dan minder bila bertemu dengan orang luar yang mereka sebut "orang terang". Pemukiman yang baru ini mempengaruhi efek psikologis bagi *Suku Kubu* yang membuat mereka tidak betah bermukim di tempat yang baru tersebut (wawancara dengan anggota *Suku Kubu*, 20/10/2009).

Kehidupan *Suku Kubu* yang bersifat tradisional dan sistem nilai ketradisionalannya yang dianut itu telah dipertahankan secara ketat, dan hal ini tidak dipertimbangkan secara matang oleh Departemen Sosial. Memang, jika melihat kondisi lahan pemukiman tersebut, orang awam pun mudah menilai bahwa masyarakat terasing tidak akan betah tinggal untuk selama-lamanya di lokasi baru tersebut. Sebab lahan yang disediakan oleh pemerintah jauh dari hutan serta tidak tersedianya lahan yang cukup untuk mereka dalam melakukan kegiatan berkebun. Pengamatan penulis sendiri menunjukkan bahwa pemukiman yang tepat untuk memindahkan kelompok suku terasing, seperti *Suku Kubu* ini, adalah pemukiman yang mempunyai luas tanah yang cukup untuk mereka, baik untuk melakukan kegiatan berkebun maupun lokasinya yang tidak jauh dari hutan.

Suku Kubu adalah kelompok masyarakat yang sudah terbiasa hidup di hutan secara tradisional, dan pada dasarnya kebutuhan makanan pokok mereka dan kebutuhan lainnya diperoleh dari hutan. Gaya hidup tradisional mereka terdiri dari berburu dan meramu (*hunting and gathering*). Di hutan, mereka meramu buah-buahan, ubi-ubian, berburu binatang, menebang kayu, dan berkebun dengan cara berpindah-pindah (Andree, 1874; Damsté, 1901; Dongen, 1910; dan Dove, 1997).



Gambar 1:

Suku Kubu yang gaya hidupnya masih melakukan kegiatan berburu dan meramu (*hunting and gathering*) secara tradisional.

Demikian kenyataan program pembinaan masyarakat terasing di lokasi pemukiman kembali yang tidak mencapai target dan hasil yang diharapkan. Namun anehnya, pemerintah Desa justru mengaku berhasil melaksanakan program ini (wawancara dengan Kepala Desa, 10/11/2009). Pertimbangan yang diberikan oleh beberapa aparat pemerintahan Desa yang diwawancarai, pada dasarnya hanya melihat pelaksanaan teknis saja dan tidak melihat implikasi sosiologis dan psikologis dari pelaksanaan program yang bersifat *project oriented* ini (wawancara dengan beberapa Kepala Desa, 10/11/2009). Dimensi sosial yang seharusnya dinomorsatukan justru tidak mendapat porsi yang sesungguhnya. Pihak pemerintah, dalam hal ini instansi terkait, justru

menyalahkan kembalinya masyarakat terasing *Suku Kubu* ke tempat asal mereka sehingga menyebabkan program pembinaan tersendat-sendat. Sebagian pelaksana proyek ini mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat terasing itu rata-rata masih bodoh, tidak dapat bermasyarakat, sulit diberi penjelasan rasional, dan alasan lainnya (wawancara dengan petugas Departemen Sosial, 10/11/2009). Pernyataan yang menyudutkan masyarakat *Suku Kubu* ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan karena masyarakat *Suku Kubu*, bagaimanapun, masih memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi.

Sampai pada saat ini telah terjadi perkembangan baru, yakni bahwa proyek tersebut dilimpahkan kepada PEMDA (Pemerintah Daerah) sebagai penanggung jawab proyek. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat terasing tersebut ternyata masih berjalan tersendat-sendat. Sampai kini, masyarakat terasing *Suku Kubu* sebagian besar telah kembali ke lokasi permukiman awal mereka. Sedangkan yang masih tinggal di pemukiman baru adalah 7 KK (Kepala Keluarga) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk dibina. Sementara itu, rumah-rumah yang semula diperuntukkan bagi masyarakat terasing *Suku Kubu* yang berjumlah 72 buah, kini hanya ditempati oleh 7 KK masyarakat terasing *Suku Kubu* dan sisanya oleh masyarakat pendatang. Inilah wujud kongkret implikasi sosiologis dan psikologis dari proyek permukiman kembali masyarakat terasing *Suku Kubu* di kawasan Bukit Duabelas, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Tentang Proses Adaptasi yang Tersendat. Perubahan mutlak dialami oleh semua bentuk masyarakat di muka bumi ini (Cassirer, 1987). Demikian halnya dengan masyarakat terasing *Suku Kubu* yang menjadi objek penelitian ini. Seperti umumnya perkembangan suatu masyarakat, setelah hidup dengan cara berpindah-pindah sebagai peladang dan pemburu, masyarakat terasing *Suku Kubu* akhirnya menetap dan memilih hidup dengan bercocok tanam. Di tempat permukiman baru itulah masyarakat ini membangun kehidupannya. Pola hidup yang baru ini akhirnya melahirkan pranata-pranata sosial yang baru pula, yang diharapkan dapat mengatur kehidupan bersama secara harmonis.

Dari kehidupan yang hampir sama sekali tidak memungkinkan untuk berhubungan dengan masyarakat lain di luar komunitasnya, akhirnya mereka harus menghadapi sesuatu yang memang mutlak demi kelangsungan hidup. Meskipun secara teritorial kehidupan masyarakat *Suku Kubu* berbeda dengan masyarakat biasa yang bermukim di kawasan Bukit Duabelas, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, namun bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali antara keduanya. Beberapa anggota masyarakat *Suku Kubu* sering "turun ke kampung" (menurut istilah mereka) untuk menjual hasil kebun dan kemudian membelikan bahan kebutuhan hidup di hutan, seperti minyak kelapa, gula pasir, beras, dan lain-lain. Oleh sebab itu, secara sosiologis mereka telah mengenal kehidupan yang lain dan dirasakan lebih maju dari kehidupan mereka (wawancara dengan anggota *Suku Kubu*, 20/10/2009).



Gambar 2:

Sejak dini, masyarakat *Suku Kubu* telah menyadari sulitnya membangun kehidupan yang baru, mengolah kembali tanah yang masih kosong, apalagi jika tanah tersebut jauh dari kesuburan.

Akan tetapi, perubahan zaman telah membawa manusia kepada cara hidup modern dan berorientasi materialistis (Suparlan, 1988). Bagaimanapun, kehidupan modern yang berwatak materialistis tersebut akhirnya akan memasuki sendi-sendi kemasyarakatan *Suku Kubu*. Pertambahan penduduk, yang diiringi oleh kebutuhan hidup semakin meningkat, tidak didukung sepenuhnya oleh sumber daya alam yang tersedia. Orientasi terhadap nilai dan pola pikir akhirnya membawa konsekuensi lain, yang pada akhirnya akan menggugah kesadaran mereka akan kehidupan yang normal seperti masyarakat pada umumnya (Soelaiman, 1998).

"Penyesuaian sosial" yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah berhubungan dengan program permukiman kembali masyarakat *Suku Kubu* di kawasan Bukit Duabelas, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Akar-akar persesuaian sosial memang telah ada sejak dulu, namun kondisi ini lebih dianggap oleh pihak pengelola program sebagai salah satu faktor yang akan memudahkan masyarakat yang dimukimkan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat di kawasan Bukit Duabelas, Kabupaten Musi Banyuasin. Di samping itu, keberadaan para Pendeta agama Kristen yang ada turut memantapkan keyakinan para pengelola program ini akan keberhasilan proyek pembinaan bagi masyarakat terasing *Suku Kubu*

(wawancara dengan Kepala Desa dan dengan petugas Departemen Sosial, 10/11/2009).

Ketika tahap pertama proyek ini mulai dilaksanakan pada tahun 1989, yakni dengan diturunkannya 50 KK (Kepala Keluarga) ke lokasi baru, persoalan-persoalan yang mulanya tidak diharapkan mulai bermunculan. Sejak dini, sesungguhnya masyarakat *Suku Kubu* telah menyadari sulitnya membangun kehidupan yang baru, mengolah kembali tanah yang masih kosong, apalagi jika tanah tersebut jauh dari kesuburan. Kemudian dengan segala kondisi yang serba terbatas, mereka harus pula berupaya melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial yang baru. Penyesuaian dengan lingkungan baru itu saja demikian sulitnya, apalagi harus melakukan hubungan sosial dengan pola kehidupan masyarakat yang lebih maju. Jelas, mereka memiliki rasa inferioritas di dalam diri anggota masyarakat terasing *Suku Kubu*, yang dalam hal ini merupakan pendatang baru. Sementara itu, bagi *Suku Mantikole*, sebagai masyarakat yang telah lebih maju cara berpikir dan orientasi hidupnya, mereka memiliki gejala rasa superioritas yang tinggi (wawancara dengan anggota *Suku Kubu*, 20/10/2009; dan wawancara dengan Kepala Desa dan dengan petugas Departemen Sosial, 10/11/2009).

Masyarakat *Suku Kubu* sebenarnya memiliki keinginan besar untuk bergaul secara normal dengan masyarakat setempat. Hal ini tampak dalam pengamatan penulis dan wawancara yang dilakukan dengan mereka. Ada kehendak di dalam diri remaja dan pemuda *Suku Kubu* untuk ikut bermain dengan masyarakat setempat, namun keberanian untuk mengajukan diri untuk ikut bermain itu tidak ada. Romses (21 tahun), misalnya, menyatakan bahwa dia sering datang ke tempat lapangan *volley ball*. Ia ingin sekali ikut bermain dengan mereka, namun selama dia menonton permainan bola voli itu tidak pernah ada anggota masyarakat setempat yang menegurnya, apalagi yang mengajaknya untuk bermain bola voli (wawancara dengan Romses, 20/10/2009).

Kembalinya sebagian besar anggota *Suku Kubu*, sebanyak 50 KK, ke hutan adalah jawaban mereka atas kondisi sosial yang justru akan menjebak mereka kepada keadaan yang lebih mengasingkan mereka dari keterasingan yang dirasakan selama ini. Namun, kepindahan mereka ke hutan tetap dianggap sebagai ketidakmampuan mereka dalam beradaptasi dengan masyarakat setempat (wawancara dengan Kepala Desa dan dengan petugas Departemen Sosial, 10/11/2009). Pelajaran penting yang penulis peroleh dari lapangan bahwa sesederhana apapun masyarakat *Suku Kubu* itu, namun harga diri dan kesadaran mereka yang tinggi terhadap aspek kemanusiaan masih merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi. Karena mereka ingin menghindari konflik secara fisik, maka mereka memilih kembali ke lokasi semula daripada menerima kenyataan bahwa masyarakat setempat tidak dapat menerima keadaan mereka.

REFLEKSI TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN MENUJU IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN

Dalam sebuah wawancara dengan penulis, *Temenggung Tarib* (Kepala *Suku Kubu*), menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Kameko memang teseseh dari urang terang. Kameko dak pacak mace neles, tapi kameko bajo, kemano dak katek urang nak ngajo. Kameko dak pacak bekebon di laman nyang baru aman tananye dak besak, di tempat barutu kameko dak suju amanke tananye jao dai utan, kameko nak baburu mangse bae bakal makan.

Artinya:

Kami memang terisolir dari masyarakat biasa, karena memang itulah cara hidup kami. Kami memang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi kemana tempat kami ingin belajar, tidak ada orang yang juga mau mengajari kami. Di tempat yang baru, kami mau saja sebenarnya, tapi luas lahannya terbatas dan jauh dari hutan tempat kami untuk berburu dan mencari makanan (wawancara dengan Temenggung Tarib, 20/10/2009).

Tersirat dengan jelas dari pernyataan Kepala *Suku Kubu* di atas bahwa ada hasrat yang besar sebenarnya untuk dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya, tersirat pula keinginan untuk menjadi lebih baik dalam kondisi hidupnya sekarang. Namun untuk mengubah pola hidup sebagai "orang bukit" yang telah mengenal pola bercocok tanam dengan ladang berpindah-pindah, maka pola menetap itu tidak mudah bagi mereka, yakni *Suku Kubu*.

Pertimbangan pertama adalah lokasi permukiman baru yang akan ditempati oleh mereka. Pertanyaannya adalah apakah tempat baru tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan dapat menunjang kehidupan secara berkesinambungan oleh masyarakat *Suku Kubu* atau tidak? Jika di tempat yang baru tersebut, dengan lahan yang terbatas, mereka tidak bisa mendukung kehidupan yang berterusan, lantas dengan cara apa mereka dapat bertahan? Inilah pertanyaan mendasar yang perlu dipertimbangkan matang-matang oleh para pihak pelaksana proyek dan pengambil kebijakan.

Anggapan kepada mereka, dalam hal ini *Suku Kubu*, sebagai masyarakat yang terasing, bodoh, dan primitif sesungguhnya muncul sebagai implikasi dari penilaian orang-orang di luar mereka yang sengaja membandingkannya secara sepihak. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak berdaya karena tidak memiliki kualitas diri yang sanggup menyamai kehidupan yang modern atau yang jauh dari nilai-nilai modernitas sehingga muncul asumsi untuk memaksakan nilai-nilai modernitas itu ke dalam kehidupan mereka. Sementara modernitas itu sendiri, saat ini, tengah mencari sumber-sumber yang lenyap untuk digali kembali berdasarkan kearifan masyarakat lokal (Djoewisno, 1988; dan Alasutari, 1996).

Konsep "permukiman kembali" justru telah merombak tatanan kehidupan masyarakat *Suku Kubu* yang telah mengakar kuat selama puluhan tahun, bahkan dari generasi ke generasi. Model "pembinaan" juga justru telah menjadi proses penghancuran secara perlahan terhadap masyarakat *Suku Kubu*. Masyarakat

Suku Kubu, dan masyarakat lokal lainnya yang masih dicap tradisional dan terasing, yang sesungguhnya memiliki kearifan lokal tersendiri tidak perlu pembinaan, mereka hanya perlu diberdayakan (*empowering*). Apa yang telah dimiliki oleh mereka itu tinggal diberdayakan atau dikembangkan menjadi sebuah kekuatan yang mampu membangun dirinya secara mandiri. Konsep "pembinaan", dengan demikian, perlu dipikirkan dan ditinjau kembali.

Konkretnya, program pembinaan dengan pola pemukiman kembali ini telah gagal melahirkan wujud masyarakat baru. Program yang telah dilaksanakan selama kurang-lebih 19 (sembilan belas) tahun, yakni sejak tahun 1990-an, hanya melahirkan keberhasilan yang semu alias *pseduo*. Keberhasilan yang semu dan cenderung dipaksakan ini bahkan tidak mengalami perkembangan apapun. Masyarakat *Suku Kubu* tidak merasa menjadi lebih modern secara fisik dan material, mereka tidak merasa menjadi lebih pintar dan lebih maju dari yang mereka harapkan dan inginkan (wawancara dengan anggota *Suku Kubu*, 20/10/2009). Dengan demikian, *Suku Kubu* beserta seluruh komponen masyarakatnya mengalami pemasangan kreativitas alamiah untuk berkembang berdasarkan kearifan lokal dan tradisional.

Aspek-aspek inilah yang ditanamkan melalui pembinaan masyarakat terasing versi pemerintah sehingga untuk mengatakannya telah berdaya di atas kreativitas sendiri tidak mungkin. Hal ini dibuktikan dengan temuan selama penelitian dilaksanakan. Konsep "pemukiman kembali" berarti konsekuensi yang harus dihadapi oleh suku terasing ini adalah mengubah pola lama menjadi pola baru, berdasarkan konsep ideal pembangunan *a la* pemerintah Orde Baru (1965-1998). Dengan sendirinya, setelah menjadi bagian dari pemerintahan Desa, maka segala keputusan dan perkembangan masyarakat ditentukan oleh kebijakan pembangunan Desa. Seluruh aspek normatif yang dimiliki oleh masyarakat tradisional harus sesuai dengan kebijakan pembangunan dan membuang semua nilai tradisi yang dianggap menghambat pembangunan dan proses modernisasi (Soelaiman, 1998). Jika demikian maka yang dialami oleh masyarakat *Suku Kubu* adalah pengasingan; dalam pengertian "pengasingan" dari komunitasnya yang sejati.

Penggunaan konsep "pembinaan" nampaknya perlu mendapat re-interpretasi, yakni dengan menghilangkan kesan-kesan modernisasi yang dipaksakan, apalagi yang dipaksakannya itu melalui pendekatan kebijakan (*policy approach*) yang tidak bijaksana. Kearifan lokal dan tradisional yang melekat dan dijiwai oleh masyarakat *Suku Kubu* harus pula difahami dan disiasati dengan pendekatan yang bernuansa kearifan. Oleh sebab itu, makna "pembinaan" sebaiknya juga diwarnai pemberdayaan dan kasih-sayang. Sebab pemberdayaan yang didasari oleh kasih-sayang juga pada hakekatnya mengandung makna pembinaan. Kedua konsep tersebut, *pembinaan* dan *pemberdayaan*, haruslah disamaartikan dengan sekeping uang dengan dua sisi yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama.

Kata "pembinaan" di satu sisi memang penting untuk digunakan sebagai cara dalam penempatan posisi masyarakat, yakni sebagai orang-orang atau

masyarakat yang dibina. Namun di lain sisi, kata "pembinaan" akan tidak tepat jika dijadikan sebagai alat untuk menguatkan posisi hukum bagi yang membina hanya sebagai pelaksana teknis saja tanpa menghiraukan aspek-aspek sosiologis dan psikologis yang menjadi sasaran binaan. Maka untuk menghilangkan kesan bahwa pembinaan itu sebagai alat hegemoni yang bersifat negatif, nampaknya lebih tepat jika digunakan kata "pemberdayaan" sebagai wahana untuk mendorong, mengayomi, dan meningkatkan kehidupan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Jadi, masyarakat lokal dan tradisional tersebut perlu juga diberi pengertian bahwa program "pembinaan" berarti adalah pemberdayaan bagi mereka yang didasari oleh kasih-sayang.

Kalau program pembinaan itu kemudian menjurus kepada hal-hal yang bersifat eksploitatif, maka masyarakat seharusnya menolak program tersebut dan menyatakan bahwa mereka bukannya tidak mau dibina tapi ingin diberdayakan dengan benar. Dengan demikian, maka masyarakat tradisional harus pula menyadari bahwa mereka juga bisa menjadi pembina bagi dirinya sendiri, mereka harus menyadari bahwa mereka memiliki sumber daya yang potensial dan besar untuk berkembang menjadi masyarakat yang maju dan modern. Sumber daya itu bisa berasal dari kearifan leluhur yang tinggal diberdayakan saja sehingga program pembinaan hanya berlaku pada hal-hal yang teknis dan praktis saja. Sedangkan menyangkut hal-hal yang bersifat motivasional, tradisi etnis, ukuran normatif, dan nilai sakral-profane lebih dikembangkan melalui pemberdayaan karena masyarakat lokal dan tradisional sudah memiliki semuanya.

Pola pemukiman kembali sebenarnya mempunyai tujuan yang sangat memungkinkan bagi pemberdayaan masyarakat. Penekanan yang penulis maksudkan adalah agar konsep "pembinaan" di sini menjadi acuan teknis saja, sedangkan acuan normatifnya adalah pemberdayaan suku asli (*indigenous people*). Diharapkan dengan tawaran ini maka pada tingkat implementasi, para pembina atau pelaksana dapat dibekali atau membawa bekal semua perangkat teknis; namun ketika sudah berada di lapangan, segala hal teknis tadi dikawinkan dan dipadukan dengan sumber-sumber kearifan lokal yang kaya dalam masyarakat tradisional. Hasilnya adalah merupakan kata "pembinaan" dalam arti yang sesungguhnya, yakni bahwa masyarakat pun akan mampu menjadi pembina bagi dirinya sendiri, sebab landasan dari semua yang dilaksanakan itu bersumber dari nilai yang mereka junjung tinggi, yakni adat-istiadat, nilai, norma, dan tradisi mereka sendiri.

KESIMPULAN

Dari awalnya, *Suku Kubu* dianggap dapat "dibina" melalui program PMT (Pembinaan Masyarakat Terasing) dengan pola permukiman perkampungan, yakni memindahkan mereka ke pemukiman baru. Dengan pemukiman baru diharapkan suku terasing, seperti *Suku Kubu*, dapat dimasyarakatkan seperti layaknya masyarakat yang sudah maju. Program ini dilakukan ketika

pemerintah mengamati adanya indikasi bahwa mereka sering berkunjung ke pasar-pasar tradisional yang ada di desa terdekat dengan komunitas mereka. Asumsi yang kemudian ditarik adalah bahwa mereka (*Suku Kubu*) bisa dimasyarakatkan karena telah mengenal kehidupan di luar komunitasnya. Disusunlah perencanaan berdasarkan konsep ideal yang rapi, dengan penanggung jawab teknis adalah Departemen Sosial. Pihak Departemen Sosial kemudian telah memberikan sosialisasi berupa penyuluhan awal untuk memberi motivasi kepada suku terasing, dalam hal ini *Suku Kubu*, selama dua tahun sambil menunggu selesainya perumahan yang dibangun. Penyuluhan juga diberikan kepada Kepala Desa sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Namun di balik itu, ternyata permukiman sosial bagi *Suku Kubu* dibangun di atas tanah yang berlokasi dekat dengan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Mereka juga tidak disediakan lahan yang cukup untuk bercocok tanam. Di sisi lain, tempat pemukiman yang baru ini sangat jauh dari hutan dimana masyarakat *Suku Kubu* masih sulit mengubah kebiasaan untuk berburu binatang dan mengumpulkan makanan.

Tidak cukup bertahan dalam setengah tahun, atas kesadaran mereka dan pertimbangan rasional mereka, maka orang-orang *Suku Kubu* ini kembali ke pondok-pondok asal mereka di Bukit Duabelas. Mereka yang masih tinggal di pemukiman baru, kemudian hanya menjadi pekerja kasar dan kuli kebun. Program "pembinaan" yang mereka harapkan ternyata tidak kunjung membawa hasil. Mereka masih tidak tahu membaca dan menulis. Mereka juga tidak memiliki sumber daya ekonomi, seperti lahan perkebunan yang cukup. Satu-satunya yang mereka dapatkan adalah siraman rohani daripada penyuluh agama (Kristen) yang jelas-jelas bukan dan tidak termasuk dalam program pembinaan itu sendiri. Dengan demikian, program "pembinaan" dengan pola permukiman kembali suku terasing, termasuk *Suku Kubu*, justru merupakan proses pengasingan bagi masyarakat terasing yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan tradisional yang justru mungkin dapat membangun kembali tatanan masyarakat modern yang lebih menjamin penghargaan atas kemanusiaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk mensukseskan program memasyarakatkan suku terasing harus diubah dari pola "pembinaan" menjadi pola "pemberdayaan" dengan berbagai kebijakan antara lain: (1) Menyediakan pemukiman yang diiringi dengan penyediaan lahan yang cukup bagi suku terasing untuk berladang; (2) Lokasi pemukiman yang disediakan harus di dekat hutan, dengan demikian maka suku terasing tidak serta-merta meninggalkan pola kehidupan tradisional mereka; dan (3) Pola kehidupan tradisional *Suku Kubu* tidak dapat serta-merta diubah ke pola kehidupan modern, tetapi perlu pembinaan dengan pola pemberdayaan yang memperhatikan aspek-aspek sosiologis dan psikologis serta nilai-nilai tradisi, norma, dan adat-istiadat mereka.

Bibliografi

- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depsos RI [Departemen Sosial Republik Indonesia]. (1994). *Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.5 Tahun 1994 tentang Masyarakat Terasing*. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Departemen Sosial RI.
- Depsos RI [Departemen Sosial Republik Indonesia]. (2000). *Data dan Informasi Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing*. Jakarta: Dirjen Trasos Depsos RI [Direktur Jenderal Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia].
- Andaya, L.Y. (2001). "The Search for the 'Origins' of Melayu" dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, 15(3). Singapore: Singapore University Press.
- Andaya, W.A. (1993). *To Live as Brothers*. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press.
- Andree, K. (1874). *Das Welt der Orang Kubus Auf Sumatra: Globus, Zeitschrift für Länder und Völkerkunde*. Braunschweig: Friedrich Bieweg und Zohn.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2001). *Lévi-Strauss, Mitos, dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Press.
- Alasutari, P. (1996). *Researching Culture: Qualitative Method and Cultural Studies*. London: Sage Publications.
- Cassirer, E. (1987). *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia*. Jakarta: PT Gramedia, Translation.
- Damsté, H.T. (1901). *Een Maleische Legende Omtrent de Afstammeling der Orsten van de Musi Banyuasin en de Geschiedenis der Oerang Koeboe*. Batavia: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur Twintigste Deel Nos 1-6, Kolff & Co.
- Djoewisno, M.S. (1988). *Potret Kehidupan Masyarakat Badui*. Jakarta: Penerbit SAS.
- Dongen, V. (1910). "De Koeboes in de Onderafdeling Koeboestrecken der Residentie Palembang" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, 63, hlm.191-335.
- Dove, M. (1997). *Manusia dan Alang-alang di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soelaiman, M. Munadar. (1998). *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparlan, Parsudi. (1988). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wawancara dengan anggota *Suku Kubu* di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2009.
- Wawancara dengan Kepala-kepala Desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 November 2009.
- Wawancara dengan petugas Departemen Sosial di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 10 November 2009.
- Wawancara dengan Romses, 21 Tahun, anggota *Suku Kubu*, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2009.
- Wawancara dengan Temenggung Tarib, Kepala *Suku Kubu*, di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 20 Oktober 2009.



Pola kehidupan tradisional *Suku Kubu* tidak dapat serta-merta diubah ke pola kehidupan modern, tetapi perlu pembinaan dengan pola pemberdayaan yang memperhatikan aspek-aspek sosiologis dan psikologis serta nilai-nilai tradisi, norma, dan adat-istiadat mereka.